

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara berkembang pasti dihadapkan dengan masalah kemiskinan dan tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, namun dari jaman penjajahan sampai saat ini masih dibebankan dengan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah berkepanjangan dan belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Dari mulai masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan dapat tertimpa masalah kemiskinan, karena kemiskinan dapat menimpa kalangan masyarakat manapun dengan berbagai tingkat pendapatan yang berbeda.

Masalah kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya pendapatan. Ketika seseorang atau keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan kekurangan dalam pendapatan yang diperolehnya, maka dapat dikatakan miskin. Menurut BAPPENAS (2004) kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Hal ini sejalan dengan definisi kemiskinan yang diungkapkan oleh Suharto (2009:16) bahwa kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Menurut Ala (Nurainun dan Kurniati, 2011), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melibatkan kerja sama berbagai pihak, khususnya pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan, namun masih belum dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil penelitian Prawoto (2009), dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan yang berjudul *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, menyatakan bahwa program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah banyak mengalami kegagalan, seperti Kredit Usaha Tani (KUT) yang sejak tahun 2000 mengalami gagal total, sehingga diganti dengan program baru yakni program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada bank dan dirasakan masih gagal dalam upaya menghilangkan masalah kemiskinan.

Berdasarkan Profil Kemiskinan di Indonesia September 2013 (BPS, 2014) dinyatakan bahwa:

Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen). Selama periode Maret–September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang (dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (dari 17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat banyak. Dilihat dari pendapatan perkapita/bulan mereka, masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga masih

banyak pula yang belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan.

Masalah kemiskinan yang terjadi di setiap daerah tidak terlepas dari kepadatan penduduk di daerah tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa terdapat suatu hubungan yang positif antara tingkat kepadatan penduduk dan kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi jumlah penduduk per Km<sup>2</sup> atau per Ha, semakin kecil ladang untuk bertani, maka semakin kecil kesempatan kerja dan semakin banyak orang yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2002:96).

Sebagaimana menurut data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2013 (BPS, 2014), bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak penduduk miskinnya apabila dibandingkan dengan pulau lainnya, yakni menyumbang hingga sebesar 15,55 juta jiwa penduduk miskin dengan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi yakni 10,98 persen. Hal ini disebabkan jumlah penduduk di Pulau Jawa paling padat apabila dibandingkan dengan pulau lainnya. Sementara itu di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat menyumbang hingga mencapai 4,3 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia.

Begitu pula yang terjadi pada salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar, 2013), jumlah keseluruhan keluarga di Kabupaten Bandung Barat yaitu mencapai 388.795 keluarga. Dimana sebanyak 145.645 keluarga atau sebanyak 37,46 persen keluarga di Kabupaten Bandung Barat merupakan keluarga miskin yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Berikut ini merupakan data jumlah keluarga miskin berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2013.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 di Kabupaten Bandung Barat**  
**Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah KK	Keluarga Pra KS	Keluarga Sejahtera 1	KK Miskin	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Rongga</b>	<b>11.224</b>	<b>2.631</b>	<b>6.585</b>	<b>9.216</b>	<b>82</b>
2	Gununghalu	21.441	2.710	12.847	15.557	73
3	Sindangkerta	15.437	4.186	347	4.533	29
4	Cililin	25.667	8.924	840	9.764	38
5	Cihampelas	26.019	7.995	12.866	20.861	80
6	Cipongkor	26.643	11.524	1.106	12.630	47
7	Batujajar	15.493	5.921	1.569	7.490	48
8	Saguling	6.213	3.234	9	3.243	52
9	Cipatat	34.567	9.452	865	10.317	30
10	Padalarang	20.806	3.793	860	4.653	22
11	Ngamprah	42.855	4.570	5.004	9.574	22
12	Parompong	22.567	2.295	6.126	8.421	37
13	Lembang	48.636	11.412	4.056	15.468	32
14	Cisarua	18.027	2.420	197	2.617	15
15	Cikalong Wetan	30.230	8.809	317	9.126	30
16	Cipendeuy	22.970	672	1.503	2.175	9
Kab. Bandung Barat		388.795	90.548	55.097	145.645	

*Sumber: Badan Pusat Statistik KBB, 2013 (data diolah)*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Rongga merupakan kecamatan termiskin dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini dilihat dari jumlah persentase keluarga miskin di Kecamatan Rongga yang mencapai 82 persen dari keseluruhan jumlah keluarga.

Penduduk miskin mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan dengan penduduk lain yang tidak miskin. Berdasarkan hasil penelitian Waluyo (2006) dalam jurnal yang berjudul *Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk di Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso*, bahwa karakteristik penduduk miskin dilihat dari jenis pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, dan keberadaan tempat tinggal. Dimana sebagian besar pekerjaan penduduk miskin bekerja sebagai buruh tani sebesar 35,82%, pendapatan per bulan berkisar antara di bawah Rp.100.000 sampai dengan Rp. 400.000, tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 50,75%, Tidak tamat SD sebesar 41,79%, usia penduduk miskin rata-rata berada pada kelompok usia produktif, dimana kelompok umur terbesar pada usia 41 – 45 tahun yaitu sebesar 26,87%, dan keberadaan tempat tinggal sebanyak 53,24% bersifat semi permanen.

Menurut staff Bank Dunia dengan menggunakan data hasil Survey Ekonomi Nasional (SUSENAS, 1978), rumah tangga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga banyak, tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggota keluarganya rendah, sering berganti pekerjaan dan sebagian mereka yang telah bekerja masih mau menerima tambahan pekerjaan bila ditawarkan.

Kemudian, Rahoyo (2008) berpendapat bahwa masyarakat miskin biasanya memiliki sikap mental yang buruk, seperti kebiasaan hidup boros, tidak mau bekerja keras, dan menyerah pada nasib. Ketika seseorang memiliki sikap mental yang buruk, maka secara tidak langsung seseorang tersebut menjerumuskan diri ke dalam jurang kemiskinan.

Selain itu, Koentjaraningrat (1985) menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia terutama rakyat pedesaan di Jawa adanya sikap mental yang rendah.

Selanjutnya menurut Sumodiningrat (Nurlita, 2011:48), bahwa secara umum masyarakat miskin ditandai dengan ketidakberdayaan/ketidakmampuan (*powerless*) dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan (*basic need deprivation*).

2. Melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*).
3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*).
4. Menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*).
5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Mengacu pada berbagai argumen tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin erat kaitannya adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan rendah, bermata pencaharian sebagai buruh tani, pendapatan rendah, mempunyai beban tanggungan banyak, serta memiliki sikap mental yang rendah, (Waluyo, 2006; SUSENAS, 1987; Rahoyo, 2008; Koentjaraningrat, 1985; Nurlita, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Adapun judul yang akan penulis angkat adalah:

**“Studi Deskriptif Sikap Mental Penduduk Miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat (Suatu Kasus pada Penduduk Miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil penduduk miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana gambaran sikap mental penduduk miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana gambaran sikap mental penduduk miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, beban tanggungan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil penduduk miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui gambaran sikap mental penduduk miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui gambaran sikap mental penduduk miskin di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, dan beban tanggungan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran, khususnya tentang kemiskinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat.